

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

TUTI KURNIATI

NIM.44.14.4.006

Program Studi: Pemikiran Politik Islam



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswi:

Nama : Tuti Kurniati

Nim : 44.14.4.006

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : **PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN
LABUHABATU SELATAN**

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di munaqasahkan.

Medan, 01 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maraimbang, MA

Drs. Muhammad Aswin, M.Ap

NIP. 19690623 199703 1 003

NIP. 19680817 200312 1 003

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHABATU**

SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas

Dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar

Sarjana Sosial (S.sos) dalam Ilmu Ushuluddin

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maraimbang, MA
NIP. 19690623 199703 1 003

Drs. Muhammad Aswin, M.AP
NIP. 196808 17200312 1 003

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATRA UATARA**

MEDAN

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT LABUHANBATU SELATAN**

Oleh

TUTI KURNIATI

Nim: 44.14.4.006

**Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam
fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatra Utara**

Medan, 01 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Maraimbang, MA
NIP. 19690623 199703 1 003**

**Drs. Muhammad Aswin, M.AP
NIP. 19680817 200312 1 003**

Surat pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Tuti Kurniati
Nim : 44.14.4.006
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
T/Tgl Lahir : Ujung Gading 17 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Alamat : Jalan Kenari blok 8 No 12

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Peran Perenpuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan**” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalam nya, maka segala kesalahan dan kekeliruan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

TUTI KURNIATI
NIM. 44.14.4.006

ABSTRAK

Nama : TUTI KURNIATI
Nim : 44.14.4.006
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin/ PPI
Pembimbing : 1. Drs. Maraimbang, MA
: 2. Drs. Muhammad Aswin, M.AP
Judul skripsi : Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kata Kunci: Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa

Perempuan berdasarkan sudut pandang ciri-cirinya, perannya dalam masyarakat, keluarga, pendidikan, dll

Adapun perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran, perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerjaan sukarela, kepala desa, dll. Lebih dari itu peran perempuan di desa kecamatan Kampung Rakyat dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menemukan teori dari lapangan dengan pendekatan sosial

antropologis yang mencakup tentang peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa kesimpulan utama, diantaranya bahwa peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat adalah peran perempuan di kecamatan Kampung Rakyat dalam kelompok keswedayaan, keterlibatan dan tingkat partisipasi dalam pembangunan sudah baik. Namun dari sisi kuantitas yang menjadi aparatur desa sangat minim. Masih banyak pandangan masyarakat yang menghambat peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kecamatan kampung Rakyat diantaranya, keraguan dari sisi kemampuan perempuan dalam memimpin, faktor pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Allah swt, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan manusia jalan kebaikan dan keselamatan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagi pihak, untuk itu sepuh nya penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak, diantaranya:

- Ayah dan Bunda, Kakak penulis yang tidak saja terlibat dalam proses penulisan ini, tetapi juga mendukung penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
- Dekan dan seluruh Staff akademik Fakultas Ushuluddin UIN SU yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan dilembaga ini.
- Pembimbing I dan pembimbing II yang telah membaca dan mengoreksi Skripsi ini sehingga segala bentuk kesalahan dapat di perbaiki sebagaimana mestinya.
- Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- Sahabat penulis yang senantiasa mendukung dan selalu ada untuk membantu penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
- Keluarga besar penulis yang tidak bisa di sebutkan nama nya satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

- Teman-teman satu angkatan dengan penulis di jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.

Akhirnya penulis mengatakan segala bentuk kesalahan dan kelemahan didalam skripsi ini sepenuhnya tanggungjawab penulis.

Medan, 29 Oktober 2018

Penulis

Tuti Kurniati

Penulisan transliterasi

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersamaan menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/ 1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	B	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	T	-
ت	Ta'	S	-
ث	Sa'	J	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	H(-
ح	H(a'	Kh	H (dengan titik dibawah)
د	Dâl	D	-
ذ	Dzâl	Z	-
ر	Rô	R	Z (dengan titik diatas)
ز	Zây	Z	-
س	Sîn	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Shôd	S(S (dengan titik dibawah)
ض	Dhôd	D(D (dengan titik dibawah)
ط	Thô	T(T (dengan titik dibawah)
ظ	Zhô	Z(Z (dengan titik dibawah)
ع	Aîn		Koma terbalik diatas
غ	Ghoîn	G	-
ف	Fâ	F	-
ق	Qôf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-

م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Hâ	H	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yâ	Y	Y

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monotrof dan fokal rangkap atau diftong

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat yang transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	a	A
(ِ)	Kasrah	i	I
(ُ)	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sabagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي (َ)	<i>Fath(ah dan ya</i>	ai	a dan i
و (ِ)	<i>Kasrah</i>	i	I

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berubah harkat dan huruf, translirasinya sebagai berikut.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا (َ)	Fathah dan alif atau ya	â	a dan garis diatas
ي (ِ)	Kasrah dan ya	i	i dan garis diatas
و (ُ)	Dammah dan wau	û	u dan garis diatas

D. Ta' Marbut))ah

Trasnliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /h/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau ada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha /h/.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱ ۲, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

G. Hamzah

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat di tulis alif, contoh:

اِن	Di tulis inna
-----	---------------

H. Hurif Besar

Huruf besar dalam tulisan latin di gunakan sesuai dengan ejaan yang di perbaharui (EYD)

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

J. Pengecualian

Sisten transliterasi ini tidak penulis berlakukan kepada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa indonesia, seperti al-quran
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatin kan. Seperti yusuf Qardawi
- c. Nama pengaarang indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti munir
- d. Nama penerbit indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Lokasi Penelitian.....	11
G .Batasan istilah	12
BAB II: LANDASAN TEORI	13
1. Tinjauan Pustaka.....	13
a. Pengertian Peran	15
b. Pengertian Perempuan.....	18
c. Pengertian Pembangunan.....	23
d. Pengertian Desa	28
BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Situs Lokasi Penelitian	38
1. Sekilas Sejarah.....	38
2. Lokasi Penelitian	40
B. Profil Masyarakat Labuhanbatu Selatan	44

BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Anlisa Dan Data Pembahasan	52
1. Analisa Data.....	52
2. Pembahasan.....	52
a. Peran perempuan dalam bidang sosial.....	56
b. Peran perempuan dalam bidang adat dan lingkungan.....	57
c. Peran perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dankesejahteraan	58
d. Peran perempuan dalam bidang perekonomian desa kecamatanKampung Rakyat	59
e. Peran Perempuan melalui PKK.....	62
BAB V: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan, keterlibatan masyarakat untuk memiliki peran serta andil dalam pembangunan sangat diperlukan. Pembangunan dalam berbagai macam bidang tentu perlu keterlibatan dari seluruh masyarakat yang tentunya harus saling mengisi dan melengkapi. Saat ini perbedaan antar kaum laki-laki dengan kaum wanita bahkan sudah semakin tak terlihat, apalagi setelah adanya isu kesetaraan gender. Memang pada hakikatnya manusia itu diciptakan sama, namun dalam pembagian kerja untuk pelaksanaan program pembangunan apakah diperlukan adanya perilaku yang berbeda antar laki-laki dibanding dengan perempuan? Atau bisa juga tetap saling melengkapi tanpa adanya distorsi penitikberatan ke salah satu gender?¹

Di jaman dahulu wanita memiliki peran yang tak kalah pentingnya dibandingkan laki-laki, terlebih saat masa kolonial belanda. Wanita memang tidak ikut berperang melawan para tentara dari koloni, namun mereka memiliki andil yang cukup besar dibalik semua itu². Peran wanita memang tidak identik dengan hal-hal kasar yang butuh pengorbanan fisik yang besar, tapi keahlian dala

¹ Veithzel Rivai, dkk, *kepemimpinan dan perilaku organisasi*, (Jakarta:Rajawali pers,2014), cet.Ke-2,h.20

² Kartini kartono, *pemimpin dan kepemimpinan/Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), cet. Ke-20,h.31-32.

menenun, memasak, membantu menyiapkan peralatan perang juga tidak bisa dianggap remeh. Tetapi jika dilihat lebih dalam, maka akan terlihat jelas akan peran sesungguhnya laki-laki bekerja untuk hal yang berat, dan wanita bekerja pada bidang yang lebih ringan. Kenyataan ini juga tidak bisa dipungkiri, karena dalam prosesnya selama bertahun-tahun wanita memang menjadi subjek yang hanya diberikan peran pada sektor dibawah kaum laki-laki. Sampai era modern sekarang ini, wanita masih dicap sebagai subjek nomor dua, atau sering di nomor duakan. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi psikis para kaum wanita yang akhirnya menyuarakan isu tentang kesetaraan gender yang menginginkan wanita dianggap setara dengan kaum laki-laki.

Memang pada dasarnya laki-laki adalah tumpuhan dan pelindung bagi wanita, atas dasar itulah laki-laki menjadi memiliki peran dan posisi lebih tinggi dibanding dengan wanita. Terkadang, wanita dicap sebagai subjek yang lemah, tidak berdaya, manja, kurang *survive* dsb, namun dibalik itu wanita memiliki potensi yang sama dengan sang adam. Pandangan-pandangan negatif yang selalu melekat pada wanitaitulah yang menyebabkan wanita kurang memiliki daya saing yang cukup sepadan dibandingkan laki-laki yang dianggap lebih bertenaga. Stigma wanita lemah adalah penilaian yang terkadang hanya menunjuk pada kriteria tertentu saja, akan tetapi sebenarnya kekuatan antara laki-laki itu bisa saja hampir sama³. Apalagi wanita yang kemudian diberikan peran ataupun posisi

³ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), cet. Ke-5, h.17.

untuk menggantikan pekerjaan laki-laki, tentunya memiliki cara dan hasil yang berbeda dalam mengolahnya.

Menurut Kantor Menteri Negara Peranan Wanita (1998), Kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita adalah suatu kondisi hubungan kedudukan dan peranan yang dinamis antara pria dengan wanita. Pria dan wanita mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang ada saat ini mulai dikenal tipe *people centered development* yang mengacu pada manusia sebagai subjek pembangunan dan dimensi ini lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya melatih atau menciptakan manusia profesional sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan dalam hal ini adalah membangun daerah perdesaan yang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki gambaran sebagai kawasan yang masih miskin, jauh dari kata modern kota besar, masyarakat yang produktifitasnya rendah, sistem sosial budaya dan kearifan lokalnya masih kental terasa perlu dibangun dengan suatu pembangunan berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk menciptakan masyarakat madani tapi juga adanya keterlibatan kaum wanita sebagai subjek pembangunan. Saat ini wanita dikenal sebagai penjaga rumah tangga dan pekerja kelas dua.⁴

⁴ Fitria Damayanti Fitria Damayanti, S.E.,M.M. *Peran Kepemimpinan Wanita dan Keterlibatannya dalam Bidang Politik di Indonesia Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNWIR Indramayu, Jurnal Aspirasi (Februari 2015),

Dalam peranan di kehidupan sehari-hari wanita memang belum bisa menggantikan pekerjaan laki-laki secara sepenuhnya, dan ini berakibat pada diskriminatif pada bias gender. Seringkali wanita hanya dipekerjakan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya hanya mencuci, memasak, menjaga rumah dan anak yang pekerjaan tersebut tidak diberi upah. Ketimpangan hal semacam itu membuat wanita seolah-olah tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan dan mengakibatkan kemiskinan.

Pembangunan perdesaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk dan terciptanya masyarakat yang madani. Pada prosesnya harus menitikberatkan pada keikutsertaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang berda di desa sebagai faktor penggerak. Kunci pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan optimal adalah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lokal yang ada di desa, sumber daya manusia juga harus dimanfaatkan dengan baik, dengan tidak memandang bias gender sebagai pemisah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan.⁵

Unsur pemberdayaan sesungguhnya harus memberi celah pada kaum wanita untuk tetap bisa berkarya dan berkeaktifitas. Kaum wanita sekarang sudah tidak bisa dipandang seperti wanita pada jaman dahulu karena pada perkembangannya, ternyata wanita juga bisa memberikan sumbangsih berupa ide,

⁵ Ahdia Indah, *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*, Jurnal *Academica*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD (Oktober 2013), Vol. 5 No.2

tenaga, dan waktu dalam menciptakan suatu inovasi yang dapat diterapkan di desa untuk pembangunan desa. Kita bisa melihat di kota-kota besar, begitu diberdayakannya wanita dalam bidang industri maupun perkantoran yang mereka merupakan wanita pekerja yang produktif. Hal seperti itulah yang sebenarnya membuktikan bahwa saat ini wanita sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai kaum yang terpinggirkan. Untuk menciptakan kolaborasi maksimal dalam membangun desa yang lebih baik, maka kolaborasi antara berbagai elemen harus bisa diajak demi menyatukan satu visi dan misi tanpa mendikotomikan gender sebagai bias jurang yang memisahkan.⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam partisipasi warga desa yaitu warga yang enggan terlibat dalam forum-forum yang ada di desa. Mereka merasa jenuh mengikuti forum tersebut karena usulan warga seringkali tidak terealisasi. Kendala lainnya adalah kehadiran perempuan dalam forum-forum perencanaan pembangunan di desa masih sangat minim.

Selama periode Maret – Oktober 2015 telah dilaksanakan program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, salah satunya di

⁶ Sofiani, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*. Jurnal Muwazah, (Januari-Juni 2009), Vol. 1, No: 1 hal. 63-72

Desa Sri Pinang Kecamatan Kampung Rakyat⁷. Secara garis besar program ini terdiri dari tiga bagian yaitu riset, edukasi warga, dan aksi bersama. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam kerangka program ini, meliputi riset untuk penetapan desa target, pelatihan untuk perempuan di desa, survey pemetaan kebutuhan warga, pertemuan warga melalui temu dusun dan temu warga desa.

Program pembangunan seharusnya menjadi alat, bukan menjadi tujuan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sehingga kesetaraan antara keduanya bisa terwujud. Pengabaian peran perempuan telah menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah, misalnya dalam bidang pendidikan ditambah dengan budaya yang tidak berpihak serta pemahaman tafsir agama yang cenderung bias gender sehingga semakin menjadikan perempuan tersudut dan memiliki posisi yang rentan. Peran perempuan dalam pembangunan desa seringkali diragukan karena dianggap tidak layak dan tidak mampu⁸.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan mulai diperhitungkan. Terlebih sejak 10 tahun yang lalu, istilah “gender” telah memasuki setiap lini masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial. Istilah gender digunakan untuk menjelaskan antara laki-laki dan perempuan. Keadaan peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau,

⁷ Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU RI Nomor 6 Tahun 2014

⁸ M. Todara dan S. Smit, *Pembangunan Ekonomi. Edisi 9*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm: 19.

kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara mengalami kelemahan.

Pada dasarnya peran perempuan dalam pembangunan merupakan hal yang penting karena keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa (BKM) diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang seringkali terlewatkan (terlupakan) ketika penyusun rencana kegiatan adalah kaum laki-laki. Posisi perempuan dalam pembangunan seharusnya ditempatkan sebagai partisipan ataupun subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda (Darwin 2005:8) bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti(istri).

Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan.

Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Keberadaan perempuan di Desa Maumbi yang menjadi lokasi penelitian ini, kebanyakan berlatar belakang etnik Minahasa, yang memosisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Artinya perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Meweteng, Perangkat Desa, hingga Kepala Desa. Di Maumbi sendiri, peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.

Hanya permasalahannya yang ada di Desa Maumbi berkaitan dengan peranan tersebut, sebetulnya sedikit menyimpang dari tradisi perempuan Minahasa, yakni peran mereka dalam kepemimpinan Desa di Maumbi terlihat kurang, seperti kurangnya perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparatur desa. Ini menjadi menarik untuk dikaji karena Perubahan masyarakat telah menganulir peran perempuan tersebut, sehingga perlu dicarikan akar permasalahannya.

Dengan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul ” **Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah “**Bagaimana Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhanbatu Selatan**”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagai mana peran perempuan dalam pembangunan desa di keca matan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi mengenai peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan mempunyai berbagai manfaat yang akan dirasakan baik oleh penulis, civitas akademik, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Secara teoritis, sebagai bahan acuan dalam memperkaya referensi khususnya tentang peran perempuan dalam pembangunan desa.

2. Secara praktis, bermanfaat bagi peningkatan dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan dengan pendekatan sosial antropologis yang mencakup tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu.

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami posisi dan peran perempuan dalam pembangunan Desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Proses ini akan di interpretasikan berdasarkan obserpasi dan pemaknaan yang di peroleh dari informen.
2. Realitas sosial merupakan suatu kenyataan konfleksitas situasi yang beragam dan multi dimensi. Oleh karena itu, kajian terhadap suatu perubahan sosial harus juga menganalisis kontek sosial yang mengitarinya dan ini hanya mungkin dilakukan melalui pendekatan kualitatif.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode obsevasi, interviw dan dokumentasi. Penggunaan metode ini disebabkan kedua metode ini secara tidak langsung didapatkan informasi yang berkaitan tentang peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Sealatan.

Interview yang diinginkan dalam penelitian ini adalah merupakan wawancara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya maupun yang belum. Maka untuk memudahkan melakukan interview ini penulis yang akan menyusun beberapa pertanyaan yang dianggap penting dalam kaitan penelitian ini, yang kemudian akan dideskripsikan berdasarkan apa yang disampaikan responden yang diteliti.

3. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan teknis analisa data yang terdiri atas pemilihan dan mengklarifikasi atau mengelompokkan data, menginformasikan pemilihan dan kelompok data secara deskripsi dan kemudian dilakukan pembuatan kesimpulan atas semua jawaban-jawaban yang diberikan responden. Untuk itulah, selanjutnya dilakukan penyeleksi atau validitasi informasi dengan menggunakan taknis triangulasi data yang di peroleh dari hasil wawancara, obsefasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang akurat dan objektif. Untuk menyempurnakan teknis analisa data tersebut penulis akan melakukan dalam tiga tahapan selanjutnya, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kecamatan kampung rakyat Kabupaten labuhanbatu selatan dengan berfokus pada setiap desa dalam kecamatan, Perencanaan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah dua minggu. (Bulan oktober 2018).

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan adanya interfrestitusi ganda dalam tulisan ini penulis memberikan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.
2. Perempuan. Secara etimologis berasal dari kata empuh yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan mengatakan perempuan berasal dari kata empuh yang artinya di hargai.
3. Desa. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang di pimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kajian pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan.

Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, kajian mengenai Peran perempuan dalam pembangunan desa studi kasus Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang belum ada yang mengkaji. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014, berdasarkan pada Pasal 26 ayat (4) poin e. dijelaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.” Dalam UU Nomor 6 tahun 2014, berdasarkan pada Pasal 68 ayat (1) poin c dijelaskan bahwa “Masyarakat desa berhak: c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.⁹

Menurut Sofiani (2009: 64), posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi

⁹ Andri Wicaksono, *Konsep Dasar IPS*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawacahlm, 2016), cet. Ke, 4. Ha. 347-349

oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi beda; kedua, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender; ketiga, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh; keempat, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan; kelima, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen; keenam, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri dan; ketujuh, kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan, sehingga perempuan kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan.¹⁰

Menurut H.A.W. dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa : Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Menurut peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Siagian (2004) memberikan pengertian tentang Pembangunan sebagai “ Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

¹⁰ M Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2010) , cet.ke-6, h.11.

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Sedangkan Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “ suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

A. Pengertian Peran

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.¹¹

Peran adalah kombinasi, posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran.

¹¹ Mulyono Djoyomartono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), cet. Ke-3, h. 35

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain..

- A. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- B. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- C. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

1. Persepsi Peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (role perception). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,2002), cet. Ke-4, h.45

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (role expectation) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

3. Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (role conflict). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Teori Peran Menurut Para Ahli.

- A. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
- B. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran

disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

- C. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143).

B. Pengertian Perempuan

Semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan keadilan. Begitu juga dengan Islam. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan tersebut, seperti firman Allah pada Surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

أَمْ نُوَدِّعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ لِأَعْيُنِنَا غَدِرُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Maidah :8) ¹³

Al-Qur'an, sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan teologis (agama), ekonomi, politik, budaya, kultural termasuk keadilan gender. Secara *diskrit*, di dunia ini yang diakui sebagai manusia "lumrah" adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Meskipun menyandang predikat sebagai manusia "lumrah", akan tetapi terdapat ketimpangan di antara keduanya, represi (penindasan) yang sungguh luar biasa. Laki-laki menguasai perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, ini adalah realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.

Adapun pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau merupakan objek seks.¹⁴

¹³ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. Ke-4, h. 135

¹⁴ Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*(Yogyakarta: LKiS, 2005), cet. Ke-1,h.5

Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.¹⁵

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan

¹⁵ Herman Saksono, *Pusat Studi wanita* (<http://www.yoho.com>, diakses 09 Oktober 2018)

mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.¹⁶

Seorang tokoh feminis, Mansour Fakih mengatakan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: *kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), cet. Ke-6, h. 54

sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.

¹⁷ *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 448

Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturalnya, dan karena itu memiliki penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak dihari pembalasan.

Jika kita menepi realitas sosial Indonesia, lebih-lebih jika kita fokuskan pada kehidupan kaum perempuan, niscaya yang akan kita temukan adalah sebuah keprihatinan. Mengapa posisi kaum perempuan tidak menguntungkan? Memang, pada satu sisi kita bisa mengatakan bahwa realitas sosial yang tidak menguntungkan kaum perempuan tersebut terkait dengan terlalu dominannya budaya *patriarki*.

Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan dalam konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat perempuan adalah pemberdayaan perempuan.

C. Pengertian Pembangunan

Di Indonesia istilah pembangunan seringkali berkonotasi atau berarti dalam membangun infrastruktur atau fasilitas fisik. Pada dasarnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju kekeadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu.

Dalam pengertian pembangunan, para ahli kemudian memberikan definisi yang juga bermacam-macam sama halnya dengan perencanaan.

Istilah pembangunan dapat juga didefinisikan atau diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lainnya, negara satu dengan negara lainnya. Namun secara umum terdapat kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.¹⁸

Definisi dari pembangunan adalah perkataan yang digunakan secara luas dalam seluruh media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang biasa diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari timur dan juga barat. Walaupun sangat sering diucapkan dan didengar namun pengertian pembangunan begitu luas cakupannya.

Pengertian pembangunan juga butuh dihayati sebelum seseorang dapat memahami keseluruhan proses dan juga teori dari pembangunan. Usaha tersebut konsep pembangun jauh lebih suka dari pada memahmi proses dan teori dari pembangunan. Namun terdapat beberapa pengertian pembangunan atau definisi pembangunan yang dapat dikatakan bahwa pengertian pembangunan adalah konsep pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, normatif atau hak keperluan asas, dan environmentalisme.

¹⁸ Rustiadi dkk, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), cet. Ke-6, h. 119-120

1. Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli

Berikut pengertian pembangunan menurut para ahli:

- a. Menurut Todaro bahwa pengertian pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan dalam memilih. Selanjutnya pengertian pembangunan menurut Todaro bahwa sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.
- b. Menurut Dudley Seer's dalam bukunya yang berjudul *The Meaning of Development* bahwa definisi pembangunan atau pengertian pembangunan adalah proses merealisasikan potensi personaliti manusia.
- c. Menurut ILO (Pertubuhan Buruh Antarabangsa) bahwa pengertian pembangunan adalah suatu yang berpaksikan manusia dengan maksud bahwa setiap proses dapat memenuhi keperluan asas setiap kehidupan manusia di sebuah negara.
- d. Menurut Ginanjar Kartasmita, bahwa definisi pembangunan adalah sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

- e. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh dari sistem sosial, misalnya politik, ekonomi pertahanan, infrastruktur, pendidikan dan juga teknologi, kelembagaan, dan juga kebudayaan.¹⁹

2. Tujuan pembangunan

Menimbang banyaknya aspek yang harus dibangun, maka pembangunan seringkali dilakukan secara bertahap. Tahapan pembangunan tersebut tidak dapat di sesuaikan dengan skala prioritas. Pembangunan tersebut menyangkut kepentingan yang didahulukan.

Adapun tujuan pembangunan Indonesia yang tersirat. Secara umum terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dimana tujuan pembangunan adalah sebagai berikut.

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial.²⁰

¹⁹ Widjajanti Mulyono, *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2016), cet. Ke-5, h. 22-25.

²⁰ Ahmad Shukri, *Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan*, (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003), cet. Ke-5, h. 309-310

Tujuan pembangunan tersebut dapat terlihat menjadi tujuan bukan hanya pembangunan kebendaan (fisik) saja. Namun, dalam tujuan pembangunan tersebut dapat tersirat tujuan pembangunan non fisik yang dapat berupa kecerdasan, kesejahteraan dan juga kedamaian. Pembangunan kebendaan atau pembangunan fisik merupakan suatu sarana dalam mencapai tujuan pembangunan non fisik.

Agar tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana mestinya dan sebagaimana seharusnya, maka dibutuhkan sebuah perencanaan pembangunan yang sebagaimana telah dijelaskan diatas.

3. Ciri-Ciri Pembangunan

Perencanaan pembangunan tersebut harus direncanakan dalam setiap tahap-tahap dari pembangun, dari hal tersebut, dibutuhkan sebuah pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan berbagai aspek khususnya lingkungan hidup. Olehnya, terdapat ciri-ciri pembangunan yang memperhatikan berbagai aspek yang dapat dilihat dibawah ini.

- a. Mencamin dalam pemerataan dan keadilan. Strategi pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh pemerataan distribusi sumber lahan dan faktor produksi, pemerataan kesempatan bagi perempuan, dan juga pemerataan ekonomi demi peningkatakn kesejahteraan.
- b. Menghargai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tersebut yang merupakan dasar dari tata lingkungan. Pemerintahan ini mempunyai

kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut demi masa kini dan masa akan datang.

- c. Menggunakan pendekatan yang integratif karena dengan menggunakan metode dari pendekatan tersebut, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungannya dapat dimungkinkan, baik untuk masa kini maupun juga untuk masa yang akan datang.
- d. Menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan dari sumber daya yang dapat mendukung pembangunan. Dengan demikian, sumber daya yang dapat digunakan dan dimanfaatkan yang tentunya secara berkelanjutan.

D. Pengertian Desa

Desa, menurut definisi universal, adalah sebuah tempat/kawasan permukiman di area perdesaan (rural). Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Desa sebagai sebuah identitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom/ berdiri sendiri (kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri).

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa. Negara kesatuan RI menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan

mengingat hak asal usul daerah tersebut. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbedadengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

1. Pengertian Desa Menurut Para Ahli

a. Bintarto

Bintarto berpendapat bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

b. Paul H. Landis

Pengertian Desa menurut Paul H. Landis adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang.

c. Rifhi Siddiq

Rifhi Siddiq mengemukakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

d. Sutardjo Kartohadikusumo

Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusumo pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

E. Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa

Perempuan perlu meningkatkan perannya dalam pembangunan di desa. Hal ini penting seiring dengan implementasi undang-undang desa dan mengucurnya dana desa sehingga semakin banyak orang menyadari mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal.

Perwujudan dua kewenangan ini bisa mendorong gerakan desa menuju desa yang sejahtera. Peran perempuan dalam pembangunan desa akan meningkatkan peluang perempuan itu sendiri agar bisa teratasi persoalannya melalui proses pembangunan desa. Proses pembangunan desa yang berjalan harus mewadahi aspirasi dan kebutuhan perempuan.

Pada bagian lain perempuan juga perlu melibatkan diri dalam proses politik dan pembangunan di desanya. Ini penting agar perempuan bukan sekedar menjadi sasaran pembahasan dan obyek pembangunan semata. Di beberapa desa bahkan pembangunan desa masih bias gender dan kurang memperhatikan aspek-aspek penting yang dibutuhkan perempuan untuk hidup sehat, sejahtera dan terbuka peran aktifnya. Sehingga perempuan perlu memperjuangkan dirinya agar

peran dalam proses politik dan pembangunan desa bisa diraih dan dilaksanakan dengan baik.

Dalam Undang undang desa disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Desa memiliki puluhan kewenangan baik berdasarkan hal asal usul maupun kewenangan skala local desa. Ditambah lagi kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Permendes No.1/2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;

- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan kewenangan berskala local desa meliputi : bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; bidang pelaksanaan pembangunan; bidang pembinaan kemasyarakata desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Ada banyak sekali peran yang bisa diambil dan dimainkan oleh perempuan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Dilihat dari kewenangan desa yang telah diatur dalam Permendesa No. 1 tahun 2015 di sana diatur apa saja kewenangan yang dimiliki desa sebagai dasar dan kuasa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Perempuan bisa mengambil banyak sekali peran pembangunan di sana, lebih jauh dan lebih dalam lagi dari PKK, dasawisma, posyandu, PAUD desa dan raskin.

Kewenangan kewenangan desa hampir semua membuka peluang bagi perempuan untuk memerankannya. Tidak ada keharusan bahwa kewenangan desa harus dijabat dan dilakukan oleh laki laki. Bahwa ada banyak kendala dan tantangan untuk menuju ke sana maka hal itulah yang perlu di jawab oleh perempuan desa itu sendiri dan pemerintah desa. Tingkat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa dari tahun ke tahun perlu terus dipantau dan didorong peningkatannya.

Perempuan desa perlu bersegera untuk menyiapkan kemampuan diri mengisi porsi dalam melaksanakan wewenang desa berdasarkan hak asal usul. Misalnya dengan menjadi perangkat Desa; terlibat dalam sistem organisasi masyarakat adat; melibatkan diri dalam pembinaan kelembagaan masyarakat; atau turut dalam pembinaan lembaga dan hukum adat.

Selain itu perempuan penting memiliki perwakilan dalam dalam penentuan kebijakan serta pelaksanaan dalam pengelolaan tanah kas Desa; tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat. Perempuan juga bisa turut dalam penentuan kebijakan desa terkait pengelolaan tanah bengkok; tanah pecatu; tanah titisara. Tidak kalah pentingnya perempuan bisa mulai dilibatkan dalam penentuan kebijakan terkait pengembangan peran masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai salah satu kewenangan desa berskala local sebenarnya membuka peran perempuan baik sebagai individu ataupun lembaga yang mewadahi perempuan. Diantara kewenangan itu adalah Membuat Peraturan di Desa; Merencanakan, melaksanakan, pemantuan dan pengendalian pembangunan desa; Mengelola Keuangan Desa; Melakukan Pungutan Desa; Mengelola Aset Desa; Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa. Selain itu perempuan bisa juga melibatkan diri dalam Melakukan Kerjasama antar desa; Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga; Menetapkan batas desa serta Penanggulangan kemiskinan.

Dalam hal pelaksanaan Pembangunan desa Perempuan juga bisa mengambil banyak peran. Dalam Hal pertanian dan ketahanan pangan perempuan bisa aktif dalam:

- a. Pengembangan Kelembagaan Petani lokal
- b. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- c. Pemasyarakatan pupuk organik;
- d. Pengembangan lumbung pangan;
- e. fasilitas modal usaha tani;
- f. membantu penyediaan benih unggul;
- g. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

Perempuan juga bisa memanfaatkan peluang terlibat dalam hal pengelolaan hutan desa; penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang pelestarian hutan desa. Selain itu bisa juga aktif dalam Perindustrian dan Perdagangan meliputi pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa dan pengelolaan pemasaran hasil industri Desa.

Dalam kegiatan ekonomi perempuan juga sudah terbiasa melakukan banyak hal dan ini bisa terus ditingkatkan. Diantaranya adalah terlibat dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan Ikan bila memiliki potensi perikanan; pengelolaan

kelompok usaha ekonomi produktif serta yang tengah dikembangkan adalah Mendirikan dan Menguatkan BUMDes.

Peran lain yang selama ini sudah banyak digeluti perempuan desa dan perlu terus ditingkatkan adalah peran di bidang kesehatan, pendidikan dan budaya. Dalam hal kesehatan perempuan bisa berperan aktif dalam penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular; fasilitasi pengelolaan posyandu; pengelolaan dana sehat; pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);

penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa dan penyelenggaraan upaya promosi kesehatan. Selain itu juga terlibat dalam pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana; dan pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga. Terkait pendidikan perempuan sudah banyak terlibat dalam Penyelenggaranya kursus-kursus ketrampilan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Satu peran penting yang perempuan harus terlibat di sana adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diantara kegiatan yang bisa dilakukan untuk hal ini adalah

- a. Pembentukan dan Fasilitasi komite perlindungan anak desa;
- b. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
- c. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender

d. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak²¹

1. **Menguatkan peran perempuan desa**

Afirmasi bagi perempuan untuk terlibat dalam politik desa perlu digerakkan. Jabatan-jabatan perangkat desa, BPD dan jabatan lain di desa seperti manager BUMDes, Manager koperasi Desa, atau lainnya perlu memberi kesempatan pada perempuan untuk turut terlibat di sana. Perlu dibuka lebih luas pula bagi perempuan untuk terlibat dalam musyawarah desa, musrenbangdes, diskusi, koordinasi dan proses-proses pendukung lainnya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Di bagian lain peningkatan kapasitas dan kemampuan warga desa juga perlu memberi afirmasi bagi perempuan. Misalnya memberi kuota bagi perempuan sekian persen untuk peserta pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Peningkatan kapasitas juga bisa disediakan dengan mempermudah akses informasi, bahan bacaan, ruang diskusi, capacity bulding, menyelenggarakan workshop, dan lain sebagainya.

²¹ Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Undang-Undang(<http://www.materisma.com> di akses pada 09 okkbtper 2018)

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Situs Lokasi Penelitian

1. Sekilas Sejarah

Untuk menjelaskan gambaran umum penelitian ini penulis akan menjelaskan secara singkat sejarah Labuhan Batu Selatan. Kabupaten Labuhan Baru selatan merupakan daerah otonom baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu yang di resmikan pada tanggal 21 juli 2008 sesuai dengan undang-undang No. 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu di Propinsi Sumkatra Utara.

Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhan Batu yang dibagi Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu. Kabupaten Labuhan Batu Sealatn dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sejarah pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan diawali dari adanya aspirasi dan keinginan masyarakat Labuhan Batu Selatan untuk membentuk sebuah daerah yang mandiri.

Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh msyarakat Labuhanbatu Selatan, DPRD Labuhan Batu Selatan selanjutnya merespon dan akhirnya mengeluarkan surat keputusan No. 63 Tahun 2005 pada tanggal 31 Oktober 2005 tentang persetujuan DPRD Labuhanbatu terhadap pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatandan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2005 bupati Labuhanbatu mengeluarkan Keputusan No.135/226/PEM/2005 tentang

penetapan Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada tanggal 12 Januari 2006 bupati Labuhanbatu mengeluarkan keputusan No. 1/K/2006 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut diikuti dengan keluarnya surat gubernur Sumatra Utara No. 903/035/k/2006 tentang bantuan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatra Utara bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di wilayah provinsi Sumatra Utara.

Pemerintah daerah Labuhanbatu rupanya memberi perhatian serius terhadap wacana pemekaran tersebut. Tidak sekedar pada persetujuan pemekaran saja, pada Universitas Sumatra Utara tanggal 27 Desember 2007 pemerintah Labuhanbatu juga memberikan dukungan berupa dukungan dana melalui keputusan bupati No. 903/452/pem/2007 tentang dukungan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi Sumatra Utara bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di wilayah provinsi Sumatra Utara.

Setelah menempuh proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 21 Juli 2008 Kabupaten Labuhanbatu Selatan resmi menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Labuhanbatu Selatan di provinsi Sumatra Utara. Kabupaten ini disahkan di Jakarta oleh presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun pejabat yang pernah menduduki jabatan sebagai Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu:²²

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel 1

BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	Nama	Masa Jabatan
1.	R. Sabrina	2009-2011
2.	Wildan Aswan Tanjung	2011- sekarang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Kecamatan Kampung Rakyat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Terletak tidak jauh dari Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kecamatan ini beribukotakan Tanjung Medan. Wilayah ini menjadi dua bagian di karenakan terpisah oleh sungai barumun, yaitu bagian Tanjung Medan dan Bagian Teluk Panji. Jarak antara bagian tersebut cukup jauh hingga perangkat pemerintah sukar melaksanakan pemerataan kemakmuran. Untuk luas wilayah nya yaitu 709,15 km². Jumlah penduduk di Kecamatan ini berdasarkan densus pada Tahun 2001 adalah 38.674 jiwa yang mendiami 15 Desa/kelurahan. Kecamatan Kampung Rakyat ini penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun peternakan.²³

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel II

KONDISI UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	Uraian	Keterangan
1.	Letak Geografis	1 ⁰ 26'00" - 2015'55" Lintang Utara 99 ⁰ 40'00" - 100 ⁰ 26'00" Bujur Timur
2.	Batas-Batas Daerah	
	-Sebelah Utara	Kabupaten Labuhanbatu
	-Sebelah Selatan	Kabupaten Padang Lawas Utara
	-Sebelah Barat	Kabupaten Padang Lawas Utara
	-Sebelah Timur	Propinsi Riau
3.	Ketinggian dari permukaan laut	100-500 mdpl
4.	Luas Daerah	3.596 km ²
5.	Rata-Rata Hari Hujan	14 Hari/Bulan
6.	Rata-Rata Curah Hujan	220,00 MM/ Bulan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk memudahkan penjelasan tentang Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini berikut akan dijelaskan luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel III

LUAS WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

No.	Kecamata	Luas (km ²)	Presentase (%)
-----	----------	----------------------------	-------------------

1.	Sungai Kanan	484,35	15,54
2.	Torgamba	1136,40	36,473
3.	Kotapinang	482,40	15,48
4.	Silangkitang	303,70	9,75
5.	Kampung Rakyat	709,15	22,76
	Jumlah	3116,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan terluas yaitu kecamatan Torgamba dengan luas 1136,40 km² atau 36,473% dari luas Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah kecamatan Silangkitang dengan luas 303,70 km² atau sekitar 9,75% dari luas Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

a. Kondisi Fisik

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi 100-500 meter diatas permukaan laut. Untuk lebih jelas mengenai topografi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.²⁴

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel IV
KETINGGIAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI RINCI
PERKECAMATAN

NO	Kecamatan	Ketinggian
1.	Sungai kanan	100-500
2.	Torgamba	>100
3.	Kotapinang	>100
4.	Silangkitang	>100
5.	Kampung Rakyat	>100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

b. Ekonomi

Kondisi perekonomian Labuhanbatu Selatan tahun 2013 secara makro cenderung mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2012. Tahun 2013 perekonomian Labuhanbatu Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 6,05 persen. Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang tercatat sebesar 6,33 persen.

Selama tahun 2013 semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 7,10 persen, diikuti oleh sektor pertanian 6,74 persen, sektor bangunan 6,03 persen, sektor industri pengolahan 5,97 persen, sektor jasa-jasa 5,97 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 5,53 persen, sektor perdagangan hotel dan restoran

5,45 persen, sektor pertambangan dan penggalian 4,90 persen, serta sektor listrik, gas dan air bersih masing-masing 4,90 persen.

B. Profil Masyarakat Labuhanbatu Selatan

Profil Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kota Pinang yang merupakan Ibukota dari kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, KotaPinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Geografis

Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten labuhanbatu selatan berada pada $1^{\circ}26'0''$ – $2^{\circ}12'55''$ Lintang Utara, $99^{\circ}40'0''$ – $100^{\circ}26'00''$ Bujur Timur, dengan ketinggian 0-700 m di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu selatan menempati area seluas 3116,00 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan, yang terdiri dari 52 desa, 2 kelurahan, 25 lingkungan, dan 422 dusun.

Kecamatan yang ada dilabuhanbatu selatan:

- Kota Pinang
- Kampung Rakyat
- Torgamba
- Sei Kanan
- Silangkitang

Wilayah kabupaten labuhanbatu selatan berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten labuhanbatu
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten padang lawas
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten padang lawas utara
- Sebelah timur berbatasan dengan provinsi riau

2. Iklim

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu selatan juga termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.²⁵

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

a. Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah sebagai potensi sumberdaya manusia sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan. Namun demikian jumlah penduduk belum cukup untuk kepentingan pembangunan apabila tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Kuantitas dan kualitas penduduk akan memberikan gambaran profil sumber daya manusia suatu daerah. Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Labuhanbatu Selatan sementara adalah 277.673 orang, yang terdiri atas 141.765 laki-laki dan 135.908 perempuan.

²⁵ <http://Labuselkabbps.go.id>, diakses 22 agustus 2018

Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Labuhanbatu Selatan masih bertumpu di kecamatan Torgamba yakni sebesar 36,47 persen, kemudian diikuti oleh Kota Pinang sebesar 15,54 persen, sedangkan kecamatan lain-nya di bawah 19 persen. Torgamba, Kota Pinang, dan Kampung Rakyat adalah 3 kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 99.010 orang, 53.954 orang, dan 51.020 orang. Sedangkan Kecamatan Silangkitang merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya, yakni sebanyak 28.282 orang. Dengan luas wilayah Labuhanbatu Selatan sekitar 3.116,00 kilo meter persegi yang didiami oleh 277.673 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Labuhanbatu Selatan adalah sebanyak 89 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kota Pinang yakni sebanyak 112 orang/km².

sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan kampung rakyat yakni sebanyak 73 orang/km². hal ini terjadi karena kecamatan kota pinang terletak di ibukotakabupaten labuhanbatu selatan. Sebahagian besar penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Suku Batak mandailing 70%, Suku Melayu 10%, Suku Jawa 15%, dan selebihnya suku-suku lain 5 %. Secara umum, sex ratio penduduk Labuhanbatu Selatan adalah sebesar 104, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Torgamba yakni sebesar 106 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Silangkitang yakni sebesar 103 yang

berarti jumlah penduduk laki-laki 3 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

F. Tenaga kerja

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Labuhanbatu selatan ada sebanyak 63,80. Jumlah penduduk labuhanbatu selatan yang merupakan angkatan kerja pada tahun 2010 adalah sebanyak 126 211 ribu jiwa, yang terdiri dari 119 271 ribu jiwa yang bekerja dan sebesar 6 940 ribu jiwa yang tidak bekerja (pengangguran). Penduduk labuhanbatu selatan yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian,kehutanan, perburuan, dan kelautan sebanyak 84 968 ribu jiwa. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja dilabuhanbatu selatan adalah sektor perdagangan besar, eceran,rumah makan dan hotel sebanyak 15 510 ribu jiwa. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa.

4. Pemerintahan

a. Wilayah Administrasi

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu selatan terdiri dari 5 kecamatan, yang terdiri dari 52 desa,2 kelurahan, 25 lingkungan, dan 422 dusun.

b. DPRD

Jumlah anggota DPRD di kabupaten labuhanbatu selatan pada tahun 2010 menghasilkan 30 orang anggota DPRD. Kabupaten labuhanbatu selatan yang terdiri dari 25 anggota DPRD laki-laki, dan 5 anggota DPRD Perempuan.

c. Pegawai Negeri Sipil

Jumlah PNS Otonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2010 berjumlah 2.862 orang. Jika dirinci menurut golongan, sebagian besar merupakan golongan III yaitu mencapai 1536, dan yang terkecil adalah golongan I yaitu 24.

5. Saran dan Prasarana.

a. Transportasi

Arus lalu lintas barang dan jasa dari dan ke ibukota kabupaten (kota pinang) sudah cukup lancar. Prasarana perhubungan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah cukup memadai. Untuk panjang jalan kabupaten tahun 2010 sebagian besar permukaannya adalah tanah yaitu sepanjang 217,65 km, diaspal sepanjang 160,95 km, dan kerikil sepanjang 141,71 km.

Arus lalu lintas barang dan jasa dari dan ke ibukota kabupaten (kota pinang) sudah cukup lancar. Prasarana perhubungan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah cukup memadai. Untuk panjang jalan kabupaten tahun 2010 sebagian besar permukaannya adalah tanah yaitu sepanjang 217,65 km, diaspal sepanjang 160,95 km, dan kerikil sepanjang 141,71 km.

b. Pendidikan

Pendidikan sangat dibutuhkan/diperlukan untuk kebutuhan kelak, karena itu diharapkan penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat. Pada tahun 2010 terdapat,.

- sekolah dasar negeri (SDN) terdapat 169 sekolah dengan jumlah murid 36 212 orang, dan guru 1 384 orang.
- tingkat Sekolah Pertama(SMP) N terdapat 17 sekolah, dengan 5 636 orang murid dan 372 orang guru.
- Untuk SMA N terdapat 6 sekolah, dengan 2 466 orang murid, dan 188 orang guru.

Rasio murid-guru terhadap sekolah untuk tingkat SD adalah 26,16 per sekolah dengan rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Torgamba dengan ratio 49,18 dan terendah di Kecamatan Sungai Kanan dengan ratio 15,89 per sekolah. Untuk SMP N Rasio murid terhadap sekolah adalah 15,15 persekolah. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Kanan yaitu 1,37 per sekolah dan terendah di Kecamatan Silangkitang yaitu 12,66 per sekolah. Sementara untuk tingkat SMA N rasio murid terhadap sekolah adalah 13,12 per sekolah. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan silangkitang yaitu 15,22 per sekolah dan terendah di Kecamatan Kota Pinang yaitu 12,06 murid per sekolah.

c. Fasilitas kesehatan

Banyaknya fasilitas kesehatan di kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2010 berupa posyandu sebanyak 287, puskesmas ada sebanyak 11, dan rumah sakit ada 3. Sedangkan sarana pelayanan kesehatan seperti dokter umum yang ada sebanyak 47 orang, dokter gigi sebanyak 12 orang, dan dokter spesialisasi hanya 1 orang. Begitu juga jumlah bidan dan perawat swasta maupun negeri sebanyak 323 orang.

d. Keagamaan

Banyak nya tempat peribadatan di abupaten labuhanbatu selatan seperti mesjid sebanyak 367 unit,musholla sebanyak 252 unit,sedangkan gereja 125 unit, dan pura hanya 2 unit.

e. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut jenis konsumsi di kabupaten labuhanbatu selatan yaitu berupa makanan sebanyak 308 177 rupiah/bulan dengan persentase 65,52%, dan yang bukan makanan sebanyak 162 178 rupiah/bulan dengan persentase 34,48%.

BAB IV

TEMUAN DAN PENBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah di kemukakan dalam bagian teori bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangat ditunjang melalui beberapa indikator penting yang menjadi barometer dalam tingkat peran perempuan dalam meningkatkan pembangunan daerah, maka dalam bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang didapat berdasarkan instrumen wawancara yang disebarkan kepada para responden di lokasi penelitian.

Adapun data jumlah responden yang digunakan untuk penelitian ini sebagai sumber informasi antara lain:

- a. Keterlibatan dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat, sudah melibatkan perempuan dalam pembangua ditiap desa.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal partnership) sudah ada kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan perempuan di desa.
- c. Transparansi dan iklim berkomunikasi dalam proses pembangunan desa, pemerintahan kecamatan telah meleakukan kerja sama dengan pemerintah untuk pembangunan.

- d. Kesetaraan dan kewenangan (Sharing power/Equal powership) pemerintah telah memberikan kesetaraan wewenang buat perempuan agar perempuan mendapat kesempatan untuk berperan.²⁶

B. ANALISA DAN DATA PEMBAHASAN

1. Analisa Data

Penelitian dilakukan terhadap kaum perempuan dalam pembangunan untuk melihat seberapa besar kontribusi mereka dalam membantu pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat. Responden yang dipilih berjumlah delapan orang, temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap delapan responden yang mewakili kaum perempuan di kecamatan kampung rakyat untuk mengukur seberapa besar tingkat peran kaum perempuan dalam pembangunan desa dan dikaitkan dengan indikator-indikator pembangunan yang disusun berdasarkan prinsip partisipasi yang disusun oleh Departemen For Internasional Developmen (DFID) dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan menurut Deddy T. Tikson.

2. PEMBAHASAN

Berdasarkan statistik PBB, “ perempuan melakukan lebih dari 60% dari seluruh waktu kerja didunia, tetapi mereka hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari tanah di seluruh dunia.” (Kamla Bhasin, 1993: 3-9). Dalam konteks nasional, telah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam upaya pembanguna melalui kebijakan. Pemerintah

²⁶ Mubyarto, *strategi pembangunan pedesaan*, (P3PK, UGM, Yokyakarta,1989), cet. Ke-1.h.105

telah mencenangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk melakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan diberbagai bidangkehidupan dan pembangunan.

Peran perempuan dalam pembangunan desa bisa diukur dengan nyata dengan melihat sejauh mana peran perempuan didesa-desa sekecamatan kampung rakyat dalam pembangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat. Tidak dibedakan jenis kelamin tertentu yang menjadi cakupan dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam jawaban responden yang semuanya menjawab dengan “ya” semua orang terlibat, khususnya kaum perempuan.²⁷

Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership), diketahui bahwa ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upayapembangunan desa di kecamatan kampung rakyat. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang di berikan. Dalam hal transparansi, bisa diketahui bahwa semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses

²⁷ Ibid, h.113

pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang dikumpulkan. Semua responden menyatakan ya terhadap adanya transparansi.

Dalam hal kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership) dalam pembangunan desa, berbagai pihak yang terlibat dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menyadari terjadinya dominasi gender tertentu. Dalam hal kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility), semua pihak telah mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya dalam pembangunan desa.

Dalam hal keterlibatan dalam pemberdayaan (Empowerment), diketahui bahwa terdapat keterlibatan kaum perempuan didalamnya. Keterlibatan sebagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain dalam upaya pembangunan di desa yang ada di kecamatan kampung rakyat. Dalam hal kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan di desa.

Pendapatan perkapita sebagai indikator ekonomi di desa-desa kecamatan kampung rakyat diakui oleh semua responden bahwa belum cukup baik. Hal ini tentu berpengaruh pada pembangunan desa, terhadap hal itu partisipasi perempuan dalam meningkatkan pendapatan perkapita desa-desa di kecamatan kampung

rakyat sudah diupayakan namun kesadaran saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Peran perempuan dalam mempengaruhi struktur ekonomi desa di kecamatan kampung rakyat terlihat dengan baik. Adanya peran ini bisa dilihat dengan indikator yang disebutkan dalam hasil wawancara, yakni bahwa kaum perempuan turut terlibat dengan mengikuti pelatihan dari PKK dan simpan pinjam serta berbagai kegiatan perempuan lain yang dilakukan di tingkat desa sampai pada tingkat kecamatan.

Indeks kualitas hidup masyarakat khususnya kaum perempuan di desa-desa di kecamatan kampung rakyat sebagai ukuran kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada :

1. Angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun
2. Angka kematian bayi
3. Angka melek huruf²⁸

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa masyarakat kecamatan kampung rakyat khususnya kaum ibu/perempuan dan anak-anak dibawah satu tahun mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini dinas kesehatan setiap tanggal 12 diadakan posyandu bagi ibu hamil, anak-anak dan juga berlaku bagi lansia, sehingga tingkat kematian bayi berkurang, dan untuk angka melek huruf sudah berkurang karena masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Indeks pembangunan manusia (Human developmen Index) masyarakat, khususnya kaum perempuan di desa kecamatan kampung rakyat diukur dengan melihat:

²⁸ Lambang Trijono, *pembangunan sebagai perdamaian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), cet.ke- 2. h. 69.

1. Rata-rata harapan hidup pada saat lahir
2. Rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA
3. Pendapatan perkapita

Dikecamatan kampung rakyat secara khusus, untuk bayi lahir dengan selamat dan sehat, karena kaum perempuan sudah memiliki kesadaran untuk pergi keposyandu pada saat hamil dan membawa bayi ke posyandu. Untuk pendidikan sekitar 85% anak-anak sudah menduduki bangku pendidikan SD,SMP, dan SMA dan untuk mendapatkan perkapita masi kurang.

Dari data yang di paparkan diatas, bisa dikatakan bahwa peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat antara lain nampak dalam beberapa point penjelasan berikut ini:

a. Peran Perempuan Dalam Bidang sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertemuan merupakan kegiatan utama dalam membangun hubungan antara berbagai elemen masyarakat. melalui berbagai forum pertemuan tersebut, kaum perempuan memperkuat keberadaannya baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dengan adanya forum pertemuan yang dijadwalkan oleh kaum perempuan secara berkala ditingkat kecamatan sampai pada tingkat desa, memungkinkan lembaga-lembaga lebih aktif dan termotivasi mengadakan berbagai berbagai kagiatan dalam komunitas, yang demikian dapat dilihat dari aktivitas kader perempuan dalam memotori berbagai kegiatan dalam

komunitas di level desa sampai pada kecamatan, seperti penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan, olahraga dan kesenian.

Adapun kekuatan yang ada dalam bidang sosial di desa-desa sekecamatan kampung rakyat adalah bahwa telah ada organisasi sosial seperti PKK, kelompok koperasi dan arisan-arisan kelompok perempuan, dan beberapa kelompok pertemuan perempuan lain. Kekuatan organisasi seperti PKK ini bisa menjadi sarana pembantu bagi peran perempuan dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu dalam bidang sosial, peran perempuan dalam pembangunan masyarakat desa se-kecamatan kampung rakyat boleh dibilang sudah cukup baik. Namun yang perlu di perhatikan dalam penguatan peran dan aktivitas keorganisasi sosial agar supaya mengembangkan kualitas diri perempuan dibidang pengembangan wawasan, pengembangan kemampuan kreatifitas, pengembangan pengetahuan dan pengembangan peran dalam membantu masyarakat menuju perkembangan pembangunan desa bisaberjalan dengan baik.

b. Peran Perempuan Dalam Bidang Adat Dan Lingkungan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dibidang adat dan lingkungan cukup signifikan. Dalam observasi peneliti, khususnya dalam bidang adat peran perempuan dalam membantu laki-laki untuk bisa menjalankan aktivitas dalam lingkup adat dengan baik. Misalnya dalam hal adat perkawinan, perempuan hadir sebagai simbol putri yang perlu diperlakukan baik dan dihormati. Perempuan didatangi oleh pihak laki-laki dengan ritual adat yang menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh seorang perempuan di desa-desa sekecamatan kampung rakyat.

Dalam bidang lingkungan, peran kaum perempuan juga bisa dilihat dengan adanya peran besar mereka dalam mensukseskan proses urbanisasi ditingkat lokal. Hal ini sebagaimana data wawancara yang di temukan. Kaum perempuan melalui organisasi PKK telah menjalin kerja sama dengan organisasi lain seperti pemerintah untuk meningkatkan kepedulian dan pemeliharaan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Lingkungan fisik melalui penataan dan perlombaan halaman rumah bersih yang dilakukan oleh pihak organisasi PKK dalam kerjasama dengan pemerintah, dan dalam hal lingkungan non fisik melalui promosi budaya dan lingkungan daerah kecamatan dalam kerja sama dengan pemerintah daerah.

c. Peran Perempuan Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, kaum perempuan memiliki andil yang besar. Bahkan ketiga hal ini bagi kaum perempuan merupakan kunci dari upaya menciptakan keterlibatan dalam proses pembangunan desa di Kecamatan. Untuk kegiatan pendidikan sesuai dengan temuan penelitian, perempuan lebih memfokuskan pada pemberian pendidikan kepada anak-anak dan kaum perempuan itu sendiri. Sebagai contoh sebagaimana diutarakan dalam hasil wawancara adalah bahwa para ibu dan kaum perempuan di desa-desa sekecamatan memfokuskan pendidikan bagi anak-anak nya mulai dari tingkat sekolah dasar (TK dan SD), SMP dan SMA.

**d. Peran Perempuan dalam Bidang Perekonomian Desa Kecamatan
Kampung rakyat**

Masyarakat Kecamatan Kampung rakyat cukup memiliki inisiatif dalam mengembangkan pendapatannya yaitu dengan mengembangkan sektor home industri ditengah persaingan produk lokal dalam pasar global. Home industri yang ada di kecamatan kampung rakyat yaitu seperti usaha Rumah Makan, sedangkan di sektor perdagangan banyak warga kecamatan kampung rakyat yang mempunyai usaha warung-warung kecil. Usaha ini banyak dijumpai, namun sebatas warung kecil yang barang dagangannya tidak begitu lengkap.

Dari banyak nya UKM yang bermacam-macam yang menandakan besarnya antusias warga dalam mencari usaha lain untuk meningkatkan pendapat dalam perekonomian mereka. Menandakan bahwa masyarakat kecamatan kampung rakyat memiliki aset perekonomian yang potensi untuk dikembangkan secara maksimal. Namun pada kenyataannya warga kecamatan kampung rakyat masi saja mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Banyak di antara mereka yang tidak tahu bagaimana cara nya agar usaha mereka dapat berkembang, dan dari tahun ketahun tetap saja stegnan tanpa ada perkembangan perekonomian yang lebih baik.

Kendala utama yang di alami pemilik ukm-ukm di kecamatan kampung rakyat adalah mengenai pemasaran yang tidak bisa bersaing dengan produk lain di pasar global. Kendala lain juga menghambat perkembangan usaha itu antara lain seperti tidak adanya mitra usaha yang mampu di ajak kerja sama dengan baik yang bisa membantu memasarkan produk.

Seperti yang dialami pak Purnomo seorang pedagang keripik, sudah 4 tahun pak purnomo memproduksi keripik pisang tetapi belum dapat perkembangan dengan baik dan tidak mempunyai pegawai sehingga semua proses produksi dari awal dengan menggunakan alat manual sampai memasarkan ke warung-warung atau tokoh-tokoh terdekat dilaksanakan sendiri. Kurangnya tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi masing-masing ukm merupakan faktor kurang maksimalnya perkembang maksimalnya perkembangan ukm mereka.

Fakta diatas memiliki kasus yaitu kurang nya pengembangan usaha dalam pemasaran karena minimnya mitra usaha, faktor ini yang kemudian menyebabkan UKM tidak mampu keluar menuju pasar global. UKM hanya tetap bersifat lokal sehingga tidak bisa berkembang dan tidak mampu bersaing di pasaran. Pada akhirnya pemenuhan ekonomi masyarakat kecamatan kampung rakyat belum dapat teratasi dengan baik karena laba yang didapat juga tidak besar.

Bahan baku yang tidak sulit didapatkan oleh pemilik usaha, produksi yang mencukupi, manun apa daya lahan untuk memasarkan produk hanya di tempat itu-itu saja menjadikan usaha yang telah lama di rintis kurang dikenal dipasaran. Konsumen yang seharusnya menikmati produk olahan warga kecamatan kampung rakyat tidak mengetahui bahwa kecamatan kampung rakyat memiliki home industri yang beraneka ragam dikarenakan proses pemasarannya yang kurang.

Dari diagram diatas menggambarkan bahwamengembangkan kreatifitas dengan melakukan pengemasan pada produk ukm yang sudah ada serta melakukan

pemasaran ke berbagai penjuru, baik tetap eksis di dalam desa sendiri maupun menuju pasar global adalah strategi penghidupan untuk menuju output yang dapat menjadikan usaha yang telah lama di geluti oleh warga lebih meningkat serta masyarakat secara luas dapat mengenal produk ukm dari desa kecamatan kampung rakyat.

Kurangnya jaringan kerja serta informasi terhadap produk maupun proses produksi serta pemasarannya yang baik membuat ukm yang berada di kecamatan kampung rakyat kurang dapat dikenal oleh masyarakat secara luas, padahal jika ukm-ukm tersebut menghasilkan produk yang dikenal oleh masyarakat secara luas maka baik produksi maupun pendapatan akan meningkat, hal ini akan membantu dalam meningkatkan perekonomian warga setempat. Sekalipun warga Kecamatan Kampung Rakyat memproduksi macam-macam jenis usaha, namun untuk SDM yaitu produsen itu sendiri kurang kreatifitas dalam mengembangkan sebuah produksi olahan agar menjadi sesuatu yang lebih inovatif dan lebih dikenal masyarakat secara luas.

Pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam membangun suatu usaha. Tanpa adanya pemasaran suatu produksi tidak akan pernah berjalan, realitanya penduduk desa kecamatan kampung rakyat yang memiliki berbagai macam UKM yang berbeda justru mengalami hambatan dalam pemasaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan yang dimiliki. Di sisi lain juga tidak ada sosialisasi yang berkaitan tentang bagaimana cara memasarkan produk yang dihasilkan secara efektif di tengah persaingan bisnis.

Untuk memasarkan produk yang juga membutuhkan relasi usaha yang bisa mempromosikan produk hingga keluar desa agar dapat meningkatkan pendapatan. Sedangkan warga desa kecamatan kampung rakyat tidak mencoba memulai mencari relasi usaha yang banyak, khususnya yang diluar desa.

e. Peran Perempuan Melalui PKK

Gerakan PKK bertujuan untuk menunjang pembangunan dan keahlian dalam berorganisasi khususnya di Kecamatan Kampung rakyat , dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di kecamatan Kampung Rakyat. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya sangat mendukung adanya gerakan PKK dan kegiatan-kegiatan yang di programkan juga di laksanakan oleh pihak PKK di Kecamatan Kampung Rakyat. Pemerintah Kecamatan Kampung rakyat juga juga suntu berupaya membantu Tim pergerakan PKK tersebut baik itu dalam hal dana/ fasilitas (materi) maupun bantuan berupa pemikiran motifasi (moril). Dari bantuan tersebut para penggerak PKK dapat menjalankan program yang sudah di rencanakan. Kemudian berpartisipasi para istri pejabat pemerintah untuk menjadi Tim penggerak PKK juga sangat membantu proses berjalannya lembaga PKK dan antusiasnya para warga/ ibu-ibu rumah tangga untuk terlibat dalam lembaga PKK tersebut sangat membantu proses terlaksananya program pkk. Kerja samadari pihak tersebut hingga saat ini masi terjalin erat hingga PKK di kecamatan Kampung Rakyat masi dapat eksis hingga saat ini.

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi yang dibawah struktur pemerintah kecamatan kampung Rakyat, PKK

sebagai tempat para wanita sebagai pelopor penggerak pembangunan yang diwadahi melalui PKK. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat, yang bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957, serta disusunnya mata pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga tahun 1961 (10 segi pokok kehidupan keluarga) yang sekarang dikembangkan menjadi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan 10 program pokok PKK yaitu terdiri dari:

1. Penghayatan dan pengamalan pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. ;kesehatan
8. Mengembangkan hidup berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat²⁹

²⁹ Ratna Saptari, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*,(Jakarta:PT. Pustaka Utama Grafiti,1997), cet.ke-2. h. 120

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya penulis merasa penting untuk memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan skripsi ini. Kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam pembahasan bab pertama yaitu:

1. Peran perempuan di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan, keterlibatan dan tingkat partisipasi membangun sudah baik namun dari sisi kuantitas yang menjadi aparatur desa sangat minin. Hal ini disebabkan masih banyak pandangan masyarakat yang menghambat peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kecamatan Kampung Rakyat diantaranya, faktor pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.
2. Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa dikecamatan Kampung Rakyat tanpa membedakan jenis kelamin.
3. Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership), ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat. Dalam hal ini transparansi ,semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi

dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa.

4. Dalam hal kesetaraan wewenang (sharing power/Equal Powership) dalam pembangunan desa, berbagai pihak yang terlibat dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi gender tertentu.

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat secara nyata dalam peran kaum perempuan dalam berbagai bidang adat dan lingkungan, politik dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, dan dalam bidang olah raga. Adapun faktor-faktor yang menjadi peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung Rakyat seperti dari faktor Internal peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier.

B. Saran-Saran

Saran-saran dimaksudkan untuk melengkapi atas kesimpulan yang disebutkan diatas. Berkaitan tentang hal ini penulis merasa penting untuk memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan kesimpulan, yaitu: Perlu meningkatkan kauntitas perempuan yang dilibatkan khususnya dalam struktur pemerintahan, untuk menghindari stigma yang ada dalam masyarakat terkait keberadaan perempuan maka perempuan harus dapat membuktikan diri, dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, pelatihan dan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya menjaga dan mensukseskan bangsa dan negara. Dan kepada para peneliti untuk melanjutkan penelitian ini kearah yang lebih luas sebab penelitian dan pengkajian tentang peran perempuan

dalam pembangunan desa merupakan kajian yang belum banyak dilakukan. Untuk itu, penelitian tentang ini selanjutnya diharapkan sebagai upaya pendalaman kajian dalam bidang ini.

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas

1. Nama : Tutu Kurniati
2. Nim : 44.14.4.006
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Gading 17 juni 1996
4. Anak ke/dari : 2 dari 3 bersaudara
5. Alamat : Sri Pinang , Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

6. Nama orang Tua
 - a. Ayah : Suparman
 - b. Ibu : Siti Hariani
7. Alamat Orang Tua : Sripinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

B. Pendidikan

1. SD no 118180 sidonok tamat 2007
2. MTS Basilam Baru tamat 2010
3. MA Darul Falah tamat 2014
4. Masuk Universitas Islam Negri Sumatra Utara. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Jurusan Pemikiran Politik Islam pada tahun 2014 hingga meraih gelar sarjana

Peta Kecamatan kampung Rakyat



Surat pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Tuti Kurniati

Nim : 44.14.4.006

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

T/Tgl Lahir : Ujung Gading 17 Juni 1996

Pekerjaan : Mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Alamat : Jalan Kenari blok 8 No 12

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Peran Perenpuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan**” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalam nya, maka segala kesalahan dan kekeliruan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 Oktober

2018

Yang membuat
pernyataan

TUTI KURNIATI
NIM. 44.14.4.006

ABSTRAK

Nama : TUTI KURNIATI
Nim : 44.14.4.006
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin/ PPI
Pembimbing : 1. Drs. Maraimbang, MA
: 2. Drs. Muhammad Aswin, M.AP
Judul skripsi : Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kata Kunci: Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa

Perempuan berdasarkan sudut pandang ciri-cirinya, perannya dalam masyarakat, keluarga, pendidikan, dll

Adapun perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran, perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerjaan sukarela,

kepala desa, dll. Lebih dari itu peran perempuan di desa kecamatan Kampung Rakyat dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menemukan teori dari lapangan dengan pendekatan sosial antropologis yang mencakup tentang peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa kesimpulan utama, diantaranya bahwa peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat adalah peran perempuan di kecamatan Kampung Rakyat dalam kelompok keswedayaan, keterlibatan dan tingkat partisipasi dalam pembangunan sudah baik. Namun dari sisi kuantitas yang menjadi aparatur desa sangat minim. Masih banyak pandangan masyarakat yang menghambat peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kecamatan kampung Rakyat diantaranya, keraguan dari sisi kemampuan perempuan dalam memimpin, faktor pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Allah swt, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan manusia jalan kebaikan dan keselamatan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, untuk itu sepenuhnya penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak, diantaranya:

- Ayah dan Bunda, Kakak penulis yang tidak saja terlibat dalam proses penulisan ini, tetapi juga mendukung penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
- Dekan dan seluruh Staff akademik Fakultas Ushuluddin UIN SU yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan dilembaga ini.
- Pembimbing I dan pembimbing II yang telah membaca dan mengoreksi Skripsi ini sehingga segala bentuk kesalahan dapat di perbaiki sebagaimana mestinya.
- Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- Sahabat penulis yang senantiasa mendukung dan selalu ada untuk membantu penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
- Keluarga besar penulis yang tidak bisa di sebutkan nama nya satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

- Teman-teman satu angkatan dengan penulis di jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.

Akhirnya penulis mengatakan segala bentuk kesalahan dan kelemahan didalam skripsi ini sepenuhnya tanggungjawab penulis.

Medan, 29 Oktober 2018

Penulis

Tuti Kurniati

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), cet. Ke-5, hlm.17.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta : Rineka Cipta,2002), cet. Ke-4, hlm.45

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Damayanti Fitria, S.E.,M.M. *Peran Kepemimpinan Wanita dan Keterlibatannya dalam Bidang Politik di Indonesia Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNWIR Indramayu, Jurnal Aspirasi (Februari 2015),

Djoyomartono Mulyono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam Pembangunan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), cet. Ke-3, hlm. 35

dkk Rustiadi, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), cet. Ke-6, hlm. 119-120

Fakih Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. Ke-4, hlm. 135

Hasyim Syafiq, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*(Yogyakarta: LKiS, 2005), cet. Ke-1,hlm.5

Indah Ahdia, *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*, Jurnal *Academica*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD (Oktober 2013), Vol. 5 No.2

Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU RI Nomor 6 Tahun 2014

Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 448

kartono Kartini, *pemimpin dan kepemimpinan/Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), cet. Ke-20,hlm.31-32.

Mulyono Widjajanti, *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2016), cet. Ke-5, h. 22-25.

Mubyarto, *strategi pembangunan pedesaan*, (P3PK, UGM, Yogyakarta,1989), cet. Ke-1.hlm.105

Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Undang-Undang(<http://www.materisma.com> di akses pada 09 okkbtper 2018)

Rivai Veithzel, dkk, *kepemimpinan dan perilaku organisasi*, (Jakarta:Rajawali pers,2014), cet.Ke-2,hlm.20

Saptari Ratna, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*,(Jakarta:PT. Pustaka Utama Grafiti,1997), cet.ke-2. hlm. 120

Saksono Herman, *Pusat Studi wanita* (<http://www.yoho.com>, diakses 09 Oktober 2018)

Shukri Ahmad, *Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan*,(Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003), cet. Ke-5, hlm. 309-310

Sofiani, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*. Jurnal Muwazah, (Januari-Juni 2009), Vol. 1, No: 1 hlm. 63-72

Subhan Zaitunah, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), cet. Ke-6,hlm. 54

Suparmoko. M, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2010) , cet.ke-6, hlm.11.

Todara. M dan Smit. S, *Pembangunan Ekonomi. Edisi 9*. Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm: 19.

Triyono Lambang, *pembangunan sebagai perdamaian*,(Jakarta: Yayasan Obor indonesia, 2007), cet.ke- 2. hlm. 69.

Wicaksono Andri, *Konsep Dasar IPS*,(Yogyakarta: Penerbit Garudhawacahlm, 2016), cet. Ke, 4. hlm. 347-349

<http://Labuselkabbps.go.id>, diakses 22 agustus 2018

LAMPIRAN**Peta Kecamatan kampung Rakyat**

Daftar Riwayat Hidup

C. Identitas

8. Nama : Tutu Kurniati
9. Nim : 44.14.4.006
10. Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Gading 17 juni 1996
11. Anak ke/dari : 2 dari 3 bersaudara
12. Alamat : Sri Pinang , Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

13. Nama orang Tua

- c. Ayah : Suparman
- d. Ibu : Siti Hariani
14. Alamat Orang Tua : Sripinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

D. Pendidikan

5. SD no 118180 sidonok tamat 2007
6. MTS Basilam Baru tamat 2010
7. MA Darul Falah tamat 2014
8. Masuk Universitas Islam Negri Sumatra Utara. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Jurusan Pemikiran Politik Islam pada tahun 2014 hingga meraih gelar sarjana